

BAB I

PENDAHULUAN

A. TOPIK PENELITIAN

Framing Opini Masyarakat (Narasumber Berita) tentang Polemik Jabatan Gubernur DIY dalam Koran Lokal

(Analisis Framing Media atas Opini Masyarakat (Narasumber Berita) tentang Polemik Pengisian Jabatan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2008 – 2013 dalam SKH *Kedaulatan Rakyat* dan SKH *Bernas Jogja*).

B. LATAR BELAKANG

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu propinsi di Indonesia yang memiliki ciri khas. Ciri khas itulah yang menyebabkan Yogyakarta diberi gelar Daerah Istimewa dan membedakan dengan propinsi lainnya, yaitu pemerintahan dipimpin langsung oleh Sultan Hamengkubuwono sebagai gubernur serta Adipati Paku Alam sebagai wakil gubernur. Hal itu juga ditegaskan dalam Maklumat 5 September 1945 oleh Sultan Hamengku Buwono IX dan Adipati Paku Alam VIII, gubernur dan wakil gubernur pertama di Yogyakarta setelah menggabungkan diri dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia¹.

Dengan sistem pemerintahan yang demikian, tentunya tradisi serta adat-istiadat Jawa (khususnya Yogyakarta) masih kental dipertahankan. Maka dari itu

¹ Lihat dalam artikel SKH *Kedaulatan Rakyat* edisi 5 September 2008. "Sikap Yogyakarta Menuju Negara RI". Ada dokumen tentang maklumat yang menyatakan : bahwa Yogyakarta yang bersifat negara kerajaan adalah daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia, bahwa HB sebagai kepala daerah memegang kekuasaan seluruhnya di Yogyakarta dan akan bertanggung jawab langsung pada Presiden RI.

ketika muncul isu bahwa Sultan tak akan lagi menjadi Gubernur Yogyakarta, masyarakat pun jadi resah. Maka dari itu, anggota DPRD selaku wakil rakyat mencoba mengakomodasi aspirasi masyarakat dengan dibentuknya Pansus RUU Keistimewaan Yogyakarta. Tujuan Pansus adalah merancang usulan UU Keistimewaan untuk diserahkan pada DPR sekaligus sebagai pendorong lahirnya UU Keistimewaan Yogyakarta.

Setelah beredar isu pemilihan gubernur serta pernyataan Sultan Hamengkubuwono X yang tidak bersedia lagi menjadi gubernur, ternyata menimbulkan reaksi dari masyarakat Yogyakarta yang memilih adanya penetapan gubernur. Bahkan di jajak pendapat² yang dilakukan secara independen oleh Litbang *Kompas Jogja* (Baskara,2008:1) pada 27 Maret 2008 melalui telepon menunjukkan hasilnya 76,1% menghendaki Sultan HB X dan Paku Alam IX ditetapkan menjadi gubernur dan wakil gubernur DIY. Sedangkan 20,81% menginginkan gubernur DIY dipilih melalui Pilkada. Selain itu, Litbang *Kompas Jogja* juga melakukan beberapa kali jajak pendapat khususnya menjelang berakhirnya masa jabatan gubernur DIY. Namun peneliti hanya mengambil dua hasil poling yang dianggap mampu merepresentasikan aspirasi masyarakat Yogyakarta khususnya pada bulan September dan Oktober 2008, yakni pada detik-detik menuju berakhirnya jabatan Sultan HB X dan PA IX sebagai gubernur dan wagub DIY.

Pada tanggal 22 September 2008, Litbang *Kompas Jogja* (Fatchiati,2008:1) mengadakan jajak pendapat dengan tema “Besar, Dukungan terhadap wacana

² Jajak pendapat yang dilakukan Litbang *Kompas Jogja* dilakukan melalui telepon dengan responden minimal berusia 17 tahun, tinggal di Yogyakarta dan sekitarnya dan dipilih secara proporsional dan acak dengan menggunakan pencuplikan sistematis dari buku telepon terbaru.

‘Penetapan’” dari 324 responden 79,9% mendukung penetapan, sedangkan 16% memilih Pilkada. Sedangkan pada tanggal 8 Oktober 2008, yakni satu hari sebelum jabatan Gubernur dan Wagub DIY berakhir, Litbang *Kompas Jogja* (Fatchiati, 2008:1) kembali mengadakan jajak pendapat dengan tema “Berharap Sultan HB X Tetap Menjabat Gubernur DIY”. Kali ini Litbang mengambil 329 responden dengan hasil 72,3% berharap Sultan HB X ditetapkan menjadi gubernur DIY, sedangkan 25,8% setuju jika gubernur dipilih melalui mekanisme Pilkada. Jika dibandingkan, dari ketiga hasil poling dukungan terhadap wacana penetapan Sultan HB X dan PA IX berkisar antara 72 – 80 %. Namun pada jajak pendapat ketiga (8 Oktober 2008), tingkat dukungan penetapan menurun dan terbagi pada kelompok yang mendukung pilkada sehingga hasil pendukung pilkada naik menjadi 25,8%. Dengan demikian wacana yang bergulir tidak melulu pro penetapan namun juga dukungan terhadap pilkada di DIY.

Meski begitu ada beberapa kalangan masyarakat yang lebih setuju diadakan pemilihan kepala daerah untuk mewujudkan demokratisasi di Yogyakarta. Sebagian besar kalangan yang menolak adanya penetapan Sultan Hamengku Buwono X menjadi gubernur adalah dari golongan akademisi³. Sedangkan yang mendukung adanya penetapan sebagian besar berasal dari kalangan masyarakat tradisional berbasis pedesaan serta anggota DPRD DIY. Berdasarkan hasil poling draf RUU Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Pameran Pembangunan tanggal 15 – 20 Agustus 2002 terhadap 250 responden yang

³ Sebagian besar masyarakat akademis menghendaki proses demokrasi agar dilaksanakan dengan “**proses pemilihan**” sebagaimana UU No.22 / 1999, namun yang terjadi justru menguatnya penggunaan hak-hak istimewa raja. (Lihat Heru Wahyukismoyo. 2004. *Keistimewaan Jogja vs Demokratisasi*. Yogyakarta : Bigraf. Hal:8)

dijelaskan dalam buku *Keistimewaan vs Demokratisasi* (Wahyukismoyo, 2004:154), ditemukan bahwa pada salah satu item pertanyaan 84 % responden setuju adanya penetapan Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam sebagai gubernur dan wakil gubernur di masa yang akan datang. Sedangkan 16% sisanya tidak setuju dengan penetapan. Selain poling itu, terdapat beberapa hasil poling dalam buku Wahyukismoyo. Poling-poling tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Poling pendapat yang dilakukan Mashuri Maschab tahun 1989 dalam Laporan Penelitiannya mengenai Kedudukan Daerah Istimewa Yogyakarta Sepeninggal Sultan Hamengku Buwono IX (Wahyukismoyo, 2004:153) terhadap 409 responden yang tersebar di lima kabupaten. Dari sepuluh item pertanyaan, dua diantaranya menanyakan sikap masyarakat terhadap status Yogyakarta sepeninggal Sultan HB IX dimana 59,6% responden menjawab Yogyakarta harus tetap istimewa.

2. Poling pendapat hasil kerja sama Program Studi Ilmu Sosiologi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan harian *Bernas* dan Yayasan Lepera tahun 2000 dengan judul “Otonomi Daerah, Rakyat Masih Percaya Sultan”. Poling itu melibatkan 378 responden yang menghasilkan beberapa temuan, diantaranya mengenai tanggapan tentang calon kepala daerah harus keturunan Sultan yang dijawab 36% serahkan kepada masyarakat untuk memutuskan, 24% tidak ada masalah dan bisa diteruskan, 21% tidak ada masalah untuk masa sekarang, 19% bertentangan dengan semangat demokrasi. Selain itu juga mengenai harapan agar keistimewaan Yogyakarta sesuai dengan kebijakan otonomi daerah yang dijawab 29% Yogya benar-benar bisa otonom dengan basis prakarsa rakyat, 24% rakyat

dan Sultan benar-benar bisa manunggal, 23% masyarakat Yogya bisa hidup sejahtera di bawah naungan Sultan, 20% Yogya bisa dijadikan barometer demokratisasi di Indonesia, 4% Yogya akan semakin terkenal dengan budaya kritisnya.

Kemudian hasil analisis poling-poling tersebut dirangkum oleh Wahyukismoyo menjadi sebagai berikut :

“bahwa keistimewaan Yogyakarta itu sifatnya dinamis dan universal, ibarat pepatah *“tak lekang panas, tak lapuk kena hujan”*. Demikian juga kedudukan Sultan sebagai raja maupun gubernur senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman dan dinamika kehidupan masyarakatnya. Kemampuan Sultan secara pribadi maupun secara institusi yang didukung rakyatnya dalam memerankan dan memposisikan eksistensi Kasultanan dan Pemerintah Daerah dalam situasi dan kondisi apapun merupakan keistimewaan dalam konteks ini.” *(dikutip dari: Wahyukismoyo; 2004:158)*

Namun sekarang permasalahan yang muncul adalah polemik pengisian jabatan kepala daerah. Di satu sisi, masyarakat pro penetapan, namun di lain pihak terbentur dengan UU No.32 tahun 2004 yang mengatur tentang periode kepemimpinan kepala daerah yang tidak boleh lebih dari dua periode. Sedangkan Sultan sendiri telah melalui dua periode sehingga tidak dapat menjadi gubernur pada periode ketiga.

Untuk itulah muncul polemik dalam mencari jalan keluar mengenai pengisian jabatan gubernur periode 2008 -2013. Seperti telah disebutkan peneliti pada judul penelitian ini, polemik yang dimaksud adalah terbentuknya dua kubu pendapat, yakni diantara masyarakat Yogyakarta dengan pemerintah pusat yang memiliki aspirasi berbeda. Masyarakat Yogyakarta menghendaki adanya penetapan Sultan HB X dan Paku Alam IX sebagai gubernur dan wakil gubernur

pada periode berikutnya. Namun pemerintah pusat lebih menginginkan diadakan pemilihan langsung dalam menentukan gubernur Yogyakarta selanjutnya.

Bahkan ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan bahwa jabatan Sultan akan diperpanjang selama dua tahun⁴, banyak pendapat bermunculan baik dari para intelektual di Yogyakarta maupun jajaran pemerintahan di Jakarta. Hal tersebut mengundang pertanyaan karena perpanjangan jabatan selama dua tahun tidak memiliki payung hukum dan biasanya perpanjangan jabatan diberikan selama 3 bulan, 3 tahun, atau 5 tahun (1 kali periode). Padahal perpanjangan tersebut dimaksudkan untuk mengulur waktu hingga pembahasan mengenai RUU Keistimewaan Yogyakarta dapat selesai dalam dua tahun meski tetap dianggap kurang tepat oleh beberapa tokoh intelektual. Contoh intelektual yang kurang sependapat diantaranya adalah Prof. Warsito Utomo⁵ (pakar administrasi publik), Bambang Purwoko⁶ (dosen FISIPOL UGM), Gandung Pardiman dan Istianah⁷ (Wakil Pimpinan Ketua DPRD DIY).

Selama RUU Keistimewaan tidak juga selesai dibahas dan disahkan maka nasib pemerintahan Yogyakarta pun menjadi tanda tanya. Terlebih mengingat akhir masa jabatan Sultan adalah 9 Oktober 2008. Kecuali pemerintah pusat mengambil keputusan lain yang bisa menyelamatkan status Yogyakarta, misalnya

⁴ Lihat dalam artikel SKH *Kedaulatan Rakyat*, 8 September 2008. “Jabatan Gubernur Diperpanjang”. Hal. utama

⁵ Lihat artikel SKH *Kedaulatan Rakyat*. 12 September 2008. “Pemerintah Akan Terbitkan Perpu”. Hal. utama.

⁶ Lihat artikel SKH *Kedaulatan Rakyat*, 11 September 2008. “Perpanjangan Jabatan Gubernur”. Kolom Analisis.

⁷ Lihat artikel SKH *Kedaulatan Rakyat*, 10 September 2008. “DPRD DIY Tolak Keputusan SBY”. Hal. utama.

mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu)⁸ atau Keputusan Presiden (Keppres)⁹ yang berisi pengangkatan kembali Sultan Hamengkubuwono X dan Paku Alam IX menjadi Gubernur dan wakil gubernur untuk satu periode, yakni 2008-2013. Dengan demikian status Yogyakarta tetap dapat dipertahankan sekaligus juga menunggu hingga RUU Keistimewaan disahkan.

Banyaknya masukan dari berbagai pihak, serta munculnya perbedaan pendapat, menggugah peneliti untuk menganalisis proses pembingkai atas opini publik (masyarakat) melalui berita-berita pada media cetak lokal Yogyakarta. Media tersebut adalah surat kabar harian *Kedaulatan Rakyat* dan SKH *Bernas Jogja*. Peneliti melakukan penelitian mengenai proses konstruksi opini masyarakat yang berada di ranah komunikasi politik dengan metode analisis isi kualitatif dengan varian metode analisis framing Pan dan Kosciicki. Sebenarnya penelitian ini ingin melihat bagaimana suatu media memiliki kemampuan untuk membingkai (melakukan framing) opini masyarakat dalam sebuah berita. Karena bagaimanapun juga pemunculan narasumber tertentu dengan opini (wacana) tertentu dalam suatu pemberitaan merupakan salah satu proses konstruksi yang dilakukan media baik oleh wartawan sebagai penulis ataupun editor yang merepresentasikan kebijakan redaksi.

⁸ Lihat dalam *headline* SKH *Kedaulatan Rakyat* edisi 12 September 2008. "Pemerintah akan Terbitkan Perppu". Hal itu disampaikan oleh Agus Purnomo, anggota Komisi II DPR RI yang mengatakan : "...pembahasan RUUK sangat kecil kemungkinan bias selesai sebelum masa jabatan Gubernur DIY, Sri Sultan HB X habis pada 9 Oktober 2008...karena itu, pemerintah telah menyiapkan Perppu terkait dengan perpanjangan masa jabatan gubernur."

⁹ Lihat dalam *headline* SKH *Bernas Jogja* edisi 3 September 2008. "Jabatan Gubernur Perlu Diperpanjang". Hal itu disampaikan oleh Agus Sumartono, anggota DPRD Kabupaten Bantul yang menyatakan : "...sehingga langkah tepat saat ini adalah membuat Perpu atau Keppres tentang jabatan Gubernur DIY."

Sebagai perbandingan, peneliti juga menyajikan beberapa studi mengenai framing media. Berikut ini merupakan studi framing mengenai pemberitaan relokasi kawasan Parangtritis pada harian *Kedaulatan Rakyat* dan *Bernas Jogja* tahun 2007 yang dilakukan oleh Maria Palmasari. Dalam studi tersebut, Palma mencoba melihat bagaimana *KR* dan *Bernas Jogja* mengkonstruksi realitas sesuai dengan *frame* masing-masing media serta melihat keberpihakan kedua media terhadap peristiwa relokasi kawasan Parangtritis. Peristiwa relokasi tersebut menurut Palma menimbulkan konflik antara warga yang menolak direlokasi dengan pemerintah. Kemudian melalui analisis framing Pan & Kosicki, Palma menemukan bahwa kedua koran lokal itu memiliki *frame* yang berbeda dalam memandang peristiwa yang sama. Selain melihat *frame* media, Palma mencoba menggali keberpihakan dua koran lokal itu pada kelompok tertentu. Lalu Palma menyimpulkan bahwa *frame* harian *KR* terhadap relokasi adalah

“relokasi kawasan Parangtritis tersebut memberikan dampak positif ke depannya dan pengusuran yang dilakukan oleh pemerintah membuat proses pembangunan telah berjalan. Konflik yang ada dalam frame *KR* muncul karena adanya warga yang menolak relokasi yang dalam pandangan *KR* adalah warga yang bukan asli Bantul, *KR* juga memandang bahwa konflik tersebut hanya murni antara warga yang tidak mau direlokasi dan pemerintah.” (Dikutip dari: Palmasari, 2007:327)

Sedangkan *frame Bernas Jogja* lebih melihat bahwa kebijakan relokasi tersebut malah membuat warga setempat menderita dan menjadi korban, sehingga *frame* yang ditampilkan *Bernas Jogja* adalah *pemerintah tidak memberikan rasa kemanusiaan kepada warga yang sudah bertahun-tahun tinggal di kawasan Parangtritis* (Palmasari, 2007:333). Selain itu, berdasarkan hasil analisis teks dengan model Pan dan Kosicki, Palma menemukan bahwa *Bernas Jogja* lebih berpihak ke pihak-pihak yang menolak adanya kebijakan pemerintah untuk

merelokasi. Surat kabar harian *Kedaulatan Rakyat* berdasarkan analisis cenderung mendukung terlaksananya kebijakan relokasi karena dianggap dapat memberi dampak positif. Dengan *frame* yang demikian, maka dapat diketahui bahwa *KR* lebih berpihak pada pihak-pihak yang mendukung relokasi kawasan parangtritis.

Di akhir laporannya, Palma memaparkan bahwa dalam peristiwa konflik semacam itu (relokasi / penggusuran), pers seharusnya berperan sebagai penengah dengan memberi solusi terbaik dan tidak berpihak pada kelompok tertentu, namun Palma menemukan bahwa “*SKH KR dan Bernas Jogja memunculkan frame dan keberpihakan yang dimunculkan oleh kedua media tersebut. Hal ini dapat mempengaruhi pandangan khalayak untuk memiliki sikap terhadap kelompok tertentu*” (Palmasari, 2007:339). Dan seharusnya sebagai institusi media, kedua koran tersebut tetap meminimalisir keberpihakannya agar dapat menyajikan berita yang akurat, lengkap, dan seimbang.

Sementara itu, studi framing yang dilakukan oleh Danarka Sasangka lebih kepada melihat dinamika framing harian *Suara Karya* dan *Kompas* mengenai rekrutman dan pencalonan pemimpin nasional pasca pemilu 1992 dan 1997. Dalam studi tersebut terjadi pertarungan wacana, yakni wacana negara (*official discourse*) dengan wacana perlawanan (*challenger discourse*) dengan pers (media massa) sebagai *competitive arena* tarik – ulur keduanya. Untuk itulah Danarka melalui studinya bermaksud melihat *sejauh manakah pers Indonesia mampu beresonansi dengan perubahan atmosfer politik di sekitarnya dan sejauh manakah pers Indonesia di tengah perubahan tersebut mampu mengakomodasi*

kepentingan negara di satu sisi dan kepentingan masyarakat di sisi lain (dikutip dari Sasangka, 2000:44)

Setelah melalui analisis framing dengan model Pan & Kosicki, Sasangka menemukan bahwa terjadi perubahan konstruksi pemberitaan antara pasca pemilu 1992 dengan berita pasca pemilu 1997. *Suara Karya* cenderung mendukung wacana kepentingan negara sama seperti berita-berita periode 1992 – 1993 dan wacana perlawanan dari masyarakat semakin dikesampingkan (dimarginalisasikan). Sedangkan harian *Kompas* cenderung lebih mengakomodasi wacana perlawanan dari masyarakat sehingga wacana kepentingan negara tidak lagi mendominasi seperti pemberitaan pada periode 1992 – 1993. Dengan demikian, Sasangka menyimpulkan bahwa harian *Kompas* lebih dapat beresonansi terhadap perubahan atmosfer politik saat itu yang diwarnai ketegangan di antara wacana negara dengan wacana perlawanan dari masyarakat.

Jika melihat hasil studi framing yang pernah dilakukan seperti dua contoh di atas, maka penelitian yang dilakukan peneliti merupakan pengembangan lain mengenai topik framing, yakni lebih menekankan pada konstruksi media terhadap opini masyarakat (narasumber) dengan asumsi media merupakan ruang publik (*public sphere*)¹⁰ sehingga semua kalangan maupun golongan masyarakat seharusnya memiliki peluang yang sama dalam mengakses media massa (dalam hal ini surat kabar) untuk menyampaikan pendapat. Maka dari itu, masyarakat

¹⁰ Lihat Brian McNair. 1999. *An Introduction to Political Communication*. New York : Routledge. Hal.19. Istilah yang dikenalkan oleh sosiologis Jerman, Jurgen Habermas sejak tahun 1781 untuk menyebut opini publik. Menurut Habermas seperti dikutip Brian McNair, sejak abad 19, peran media sudah bertransformasi, yakni tidak hanya menyajikan berita (informasi), namun juga menampilkan opini, komentar, dan kritikan masyarakat.

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah semua golongan yang opininya muncul dalam SKH *Kedaulatan Rakyat* dan SKH *Bernas Jogja*, baik itu dari aktor politik, aparat pemerintah (baik pusat atau daerah), kelompok profesi¹¹, kelompok intelektual¹², masyarakat desa (petani, nelayan, pedagang pasar, perangkat desa / kelurahan), pengusaha / ekonom, dan mahasiswa. Peneliti juga tidak membatasi masyarakat yang dimintakan opini hanya yang berada di Yogyakarta karena terbuka peluang narasumber yang berada di pemerintahan pusat, yakni di Jakarta juga memberikan pernyataan melalui dua media lokal tersebut.

Peneliti tidak membatasi kelompok masyarakat yang memberikan opini karena untuk melihat kelompok mana saja yang sering dimunculkan opininya oleh media massa (pemetaan narasumber), sekaligus melihat bagaimana media membingkai opini tersebut, khususnya yang terkait dengan polemik pengisian jabatan gubernur DIY. Oleh karena itu, peneliti memang tidak mengerucutkan opini kelompok masyarakat mana yang akan diteliti karena ingin melihat pula alasan media yang bersangkutan dalam hal pemilihan narasumber tertentu dengan opini tertentu pula. Dengan begitu, selain melihat bagaimana dua media lokal tersebut membingkai opini narasumber, peneliti dapat mengetahui alasan serta

¹¹ Lihat Arif Zulkifli. 1996. *PDI di mata Golongan Menengah Indonesia*. Jakarta : Pusaka Utama. Hal.31. Dalam penelitiannya, Zulkifli menentukan kelompok profesional berdasarkan ciri adanya organisasi profesi, antara lain dokter (adanya organisasi profesi Persatuan Dokter Gigi, Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Ahli Bedah Indonesia,dll), Insinyur (Persatuan Insinyur Indonesia), bidan (Ikatan Bidan Indonesia), praktisi hukum (Ikadin, dll), sekretaris (Ikatan Sekretaris), akuntan (Ikatan Akuntan Indonesia), dll.

¹². *Opus Citato*, Zulkifli, 1996: 29. Dalam bukunya, Zulkifli telah mengelompokkan kaum intelektual dalam sebelas kategori, yaitu wartawan, peneliti, penulis, teoritis sosial, saintis, seniman, budayawan, pengamat politik, dosen, filsuf, dan pemikir agama (termasuk kiai, pastur, biksu, sufi)

kebijakan media dalam pemilihan narasumber dan memudahkan peneliti dalam memetakan narasumber..

Peneliti memilih studi mengenai framing media karena menarik untuk mengetahui sejauh mana peran media dalam mengkonstruksi realitas (dalam penelitian ini adalah pernyataan narasumber) sehingga menghasilkan suatu berita yang hal itu tidak dapat teruraikan jika memakai studi kuantitatif karena hasilnya tidak mendalam dan hanya menerjemahkan data statistik. Untuk itulah pada bagian analisis data, peneliti menggunakan analisis framing terhadap teks yang memuat opini masyarakat mengenai polemik pengisian jabatan gubernur DIY untuk melihat hal – hal yang ada di balik teks berita. Peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak redaksi yang diwakili wartawan penulis berita yang diteliti untuk menggali data lebih detail mengenai alasan serta kebijakan media dalam membingkai opini masyarakat menjadi sebuah berita.

Dalam studi ini peneliti menggunakan dua media yaitu SKH *Kedaulatan Rakyat* dan SKH *Bernas Jogja*. Dengan memakai dua media, maka peneliti dapat melihat bagaimana dua institusi media yang memiliki latar belakang berbeda, namun sama-sama bersifat lokal Yogyakarta, serta sama-sama fokus memberitakan Sultan Hamengku Buwono X, melakukan konstruksi atas opini masyarakat Yogyakarta mengenai polemik pengisian jabatan kepala daerah dimana kedua institusi media tersebut bernaung. Selain itu, *KR* dan *Bernas Jogja* merupakan dua koran lokal yang sejak awal lahir di Yogyakarta, yaitu tahun 1945 sehingga paham akan sejarah bergabungnya DIY ke NKRI ataupun sejarah terbentuknya daerah istimewa. Meski memiliki latar belakang yang berbeda,

namun kedua koran sama-sama intens memberitakan soal keistimewaan DIY serta mengenai pengisian jabatan Gubernur DIY. Dengan begitu, peneliti dapat menemukan opini seperti apa yang ditonjolkan dalam pemberitaan kedua media itu, apakah yang mendukung terjadinya pemilihan kepala daerah sebagai wujud demokratisasi seperti yang diwacanakan oleh beberapa kelompok masyarakat ataukah mendukung penetapan Sultan sebagai Kepala Daerah untuk menunjukkan dan memperkuat konsep keistimewaan Yogyakarta. Khususnya opini untuk menjawab permasalahan pengisian jabatan gubernur.

Seperti telah disampaikan peneliti bahwa penelitian ini memang untuk menganalisis bagaimana suatu media membingkai opini masyarakat menjadi suatu berita. Selain itu peneliti juga mencoba melihat bagaimana suatu media menampilkan seorang narasumber, wacana yang dilontarkan narasumber tersebut, serta latar belakang media tersebut memilih seorang narasumber yang merupakan bagian dari pembedaan media atas opini masyarakat.

Sedangkan frame (bingkai) opini sendiri dibentuk melalui dua dimensi, yaitu seleksi isu dan penonjolan. Seleksi ini berdasarkan pada isi opini (tematis), yakni opini yang pro penetapan Sultan Hamengku Buwono X dan opini yang pro pemilihan kepala daerah. Opini mana yang lebih diunggulkan diantara SKH *Kedaulatan Rakyat* dengan SKH *Bernas Jogja* akan menunjukkan bingkai seperti apa yang dipasang oleh masing-masing media terhadap isu polemik pengisian jabatan kepala daerah. Tentunya hal tersebut akan terbaca setelah proses analisis berita dilakukan.

Untuk dimensi penonjolan, frame opini ditentukan berdasarkan dua aspek, antara lain aspek retorik dan aspek penempatan (*placement*). Aspek retorik berhubungan dengan bagaimana wartawan menggunakan pemilihan kata, frase, atau label tertentu untuk menonjolkan atau menekankan arti tertentu pada khalayak pembaca. Sedangkan pada aspek penempatan (*placement*) lebih mengarah pada bagaimana wartawan mengatur letak serta porsi opini narasumber pada beritanya, apakah disajikan dalam banyak paragraf, apakah diletakkan pada paragraf awal atau paragraf akhir. Selain itu, pihak redaksi yang menentukan suatu berita ditempatkan sebagai *headline*, berita kolom, halaman muka, atau di halaman belakang. Kebijakan-kebijakan dalam penempatan berita maupun opini itulah yang menjadi upaya untuk menonjolkan aspek-aspek tertentu dan bertujuan untuk membingkai opini masyarakat dalam suatu berita. Dan semua hal itu akan diungkap lebih lanjut dalam penelitian ini,

C. RUMUSAN MASALAH

Secara umum, peneliti merumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

Bagaimana SKH *Kedaulatan Rakyat* dan SKH *Bernas Jogja* sebagai koran lokal melakukan pembedaan (*framing*) terhadap opini masyarakat mengenai polemik pengisian jabatan gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2008 – 2013 ?

Pertanyaan di atas lalu diturunkan menjadi pertanyaan operasional, yakni:

1. Siapakah narasumber (masyarakat) yang dimintakan opini ?
2. Wacana (opini) seperti apakah yang diungkapkan oleh narasumber tersebut?
3. Bagaimana narasumber–narasumber tersebut ditampilkan dalam pemberitaan?

4. Mengapa media tersebut memilih narasumber itu sebagai perwakilan (representasi) dari masyarakat ?

D. TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui *frame* / kemasan SKH *Kedaulatan Rakyat* dan SKH *Bernas Jogja* dalam membingkai (framing) opini masyarakat (narasumber) mengenai polemik pengisian jabatan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2008 – 2013.

E. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat teoritis dan metodologis, sebagai sebuah pengembangan metode dan model alternatif studi framing atas berita-berita koran.
2. Manfaat akademis, sebagai sumbangan bagi perkembangan pendidikan jurnalistik terkait dengan bagaimana sebuah media cetak membingkai opini narasumber untuk menghasilkan sebuah berita melalui peran wartawan serta editor (redaktur).
3. Manfaat sosial, sebagai analisis terhadap proses framing yang dilakukan media cetak untuk menghasilkan produk berita karena adanya pengaruh dari faktor eksternal dan internal. Serta memperlihatkan seberapa besar pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap pemberitaan media yang bersangkutan.
4. Manfaat praktis, sebagai bahan evaluasi bagi pekerja media menentukan narasumber untuk dimintai pendapat khususnya dalam proses pembedaan (framing) agar nantinya produk berita tersebut dapat membentuk opini publik.

F. KERANGKA TEORI

1. Konstruksi Realitas dalam Media Massa

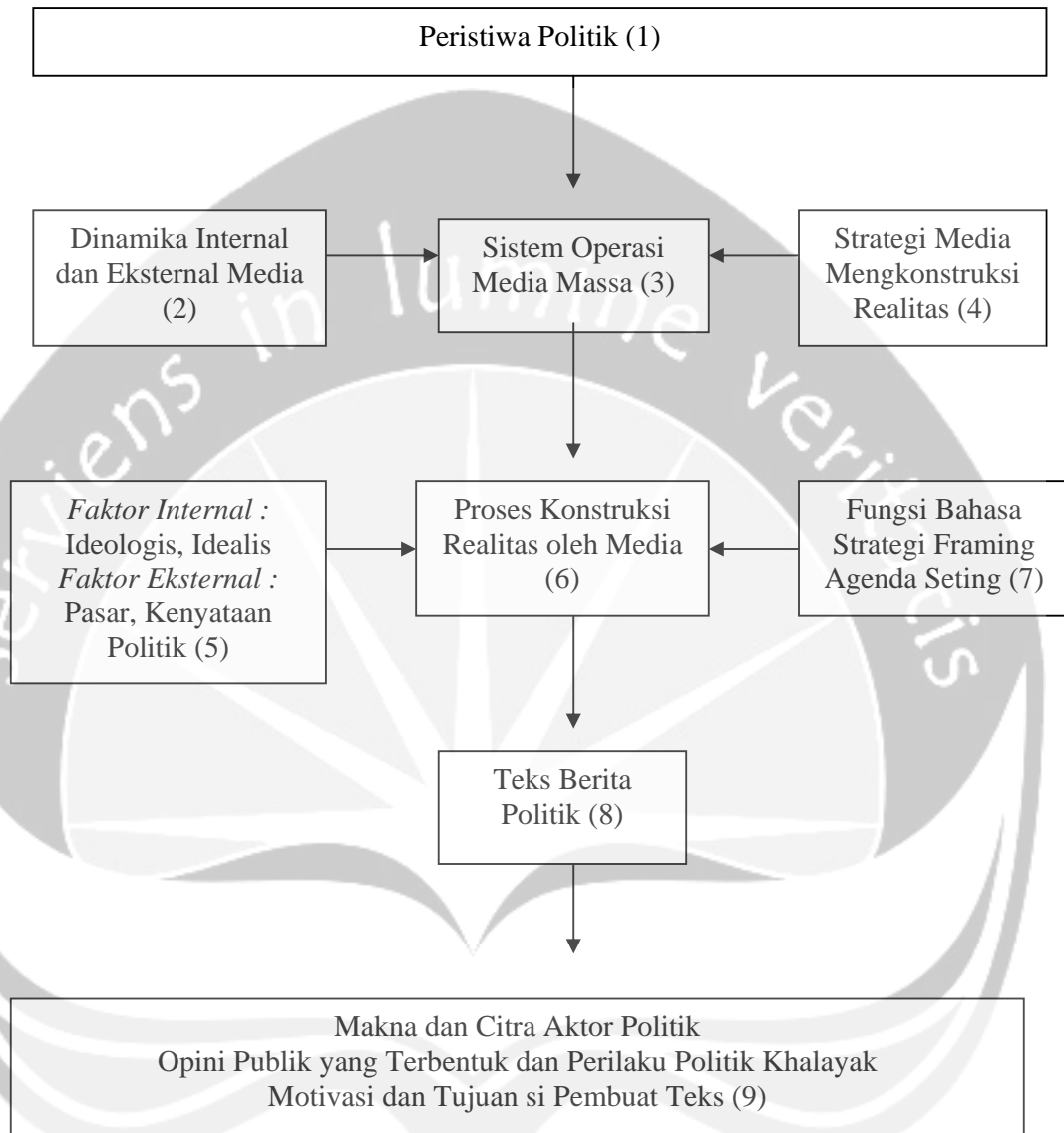
Pada penelitian ini, teori yang dipakai sebagai dasar atau pijakan adalah konstruksi realitas oleh media massa dalam menghasilkan suatu berita. Dalam proses konstruksi realitas tersebut, terbentuk pula proses pembingkaiian (*framing*) opini atau pernyataan narasumber yang menjadi fokus pada penelitian ini. Oleh karena itu, proses framing juga menjadi bagian dari teori konstruksi realitas. Namun peneliti menjabarkan proses framing secara terpisah dari teori konstruksi realitas agar lebih mudah dicermati, yakni diuraikan dalam teori framing sebagai strategi pengemasan berita.

Kerangka teori kemudian dipakai untuk memahami realitas sosial yang telah dimuat oleh media massa menjadi berita. Konsep-konsep yang terdapat dalam penjelasan teori juga digunakan untuk menjelaskan fenomena politik, khususnya yang terkait dengan topik penelitian ini, yakni mengenai polemik pengisian jabatan gubernur periode 2008 – 2013. Oleh karena itu, teori dalam penelitian ini dipakai sebagai alat untuk menjelaskan temuan-temuan selama riset dan bukan untuk menguji kebenaran teori pada hasil penelitian.

Dengan demikian dapat dikatakan melalui dua teori itu (konstruksi realitas dan framing sebagai strategi pengemasan berita), peneliti dapat menjawab masalah penelitian, yakni mengenai bagaimana SKH *Kedaulatan Rakyat* dan SKH *Bernas Jogja* melakukan framing opini masyarakat (narasumber) terkait polemik pengisian jabatan gubernur periode 2008 – 2013. Di samping itu, teori konstruksi realitas dan framing sebagai strategi pengemasan berita berguna untuk mengarahkan penelitian pada proses bagaimana suatu opini narasumber dikemas oleh suatu media.

Ibnu Hamad dalam bukunya *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa* mengungkapkan bahwa *liputan politik juga mesti memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal masing-masing media, entah itu faktor idealisme, kepentingan ekonomi dan politik, maupun ideologis* (Hamad, 2004 : 6). Untuk itulah, konstruksi realitas dalam media massa dipengaruhi pula oleh faktor-faktor di sekitarnya. Proses konstruksi realitas tersebut dapat dicermati pada **Bagan I.1**.

Secara umum, Ibnu Hamad menguraikan bagan tersebut sebagai berikut. Suatu peristiwa politik (1) ditanggapi secara berbeda oleh setiap media massa tergantung pada sistem operasi media massa (3) itu. Kemudian peristiwa politik tersebut untuk dapat menjadi suatu berita politik (8), perlu melalui proses pengkonstruksian realitas (6) yang juga dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal media (2) dan (5). Proses konstruksi tersebut juga membutuhkan perangkat, yakni (4) dan (7). Tentunya konstruksi atas realitas itu bertujuan untuk membentuk makna dan citra tertentu (9) baik yang melekat pada organisasi ataupun aktor politik. Namun dalam penelitian ini, bagan ini hanya sampai tahapan (8), yakni dimana suatu media mengkonstruksi realitas (opini / pernyataan narasumber) ke dalam suatu teks berita. Karena inti dari penelitian ini adalah melihat bagaimana opini narasumber dibentuk dan ditampilkan pada suatu media tertentu dengan adanya pengaruh dari faktor internal serta eksternal, bukan meneliti dampak dari konstruksi realitas oleh media terhadap opini atau perilaku masyarakat terhadap wacana tertentu.



Bagan I.1
Kerangka Pembentukan Wacana Politik¹³
 (Sumber ; Hamad, 2004:5)

Jika mencermati bagan Teori Konstruksi Realitas diatas, maka terlihat bahwa media memiliki peluang untuk membentuk maupun mengarahkan opini publik (masyarakat). Hanya saja meski penelitian ini lebih menitikberatkan pada

¹³ Nama bagan disesuaikan dengan topik penelitian. Nama aslinya adalah Kerangka Kerja Teori Studi Liputan Politik.

bagaimana koran lokal melakukan pbingkaian opini masyarakat namun juga mencoba melihat kemungkinan bagaimana media mengarahkan opini masyarakat melalui pemilihan *angle* penulisan berita-berita serta narasumber yang dimunculkan pada berita.

Seperti yang dijelaskan Hamad dalam bukunya, “*motivasi dan tujuan setiap media di balik teksnya dapat terlihat dari penggunaan tiga instrumen pembentukan teks (berita) tersebut: penggunaan gaya bahasa, strategi pengemasan, dan soal pemuatan*” (Hamad, 2004:6). Ketiga instrumen tersebut memiliki kemiripan dengan proses framing seperti yang diungkapkan Eriyanto dalam bukunya yang berjudul *Analisis Framing*, khususnya dalam aspek penonjolan fakta (isu), yakni sebagai berikut :

Instrumen Pembentuk Teks menurut Ibnu Hamad	Konsep Framing Eriyanto dalam Penulisan Fakta ¹⁴
Penggunaan gaya bahasa	Pemilihan kata, pemilihan kalimat
Strategi pengemasan	Pemakaian label tertentu, generalisasi, simplifikasi (penyederhanaan), pemakaian grafis, foto
Soal pemuatan	Penempatan yang mencolok (sebagai <i>headline</i> di halaman muka atau belakang)

Tabel I.1
Tabel Perbandingan Instumen Pembentuk Teks

(Sumber : diadaptasi dari *Teori Konstruksi Realitas dan Konsep Framing Eriyanto*)

Selain Ibnu Hamad, Pamela Shomaker dalam bukunya yang berjudul *Mediating the Message*, mencoba menyajikan fakta-fakta bahwa produksi berita pada suatu perusahaan media sedikit banyak dipengaruhi kebijakan organisasi yang menaunginya. Meskipun dalam profesi sebagai jurnalis membawa serta tanggung jawab, namun pada akhirnya terabaikan dengan adanya kebijakan

¹⁴ Lihat Eriyanto. 2005. *Analisis Framing*. Yogyakarta : LKIS. Hal: 69 – 70.

organisasi. Terlebih jika organisasi tersebut memiliki prioritas pada keuntungan ekonomis. Seorang jurnalis pun terhimpit antara idealisme dan tuntutan pekerjaan yang terkadang tidak mengutamakan kualitas melainkan keuntungan. Tak jarang tuntutan profesi dan tekanan dari organisasi menimbulkan konflik antar para pekerja. Sama seperti yang disampaikan Gans (1979) yang dikutip oleh Pamela Shoemaker (1991:140), adanya agenda pada masing-masing editor dan reporter terkadang tidak sejalan. Editor cenderung *audience-related*, sedangkan reporter lebih *source-related*.

Maksudnya, editor akan menilai suatu berita dari kaca mata audiens sehingga memunculkan beberapa kriteria, bahwa suatu berita dianggap layak jika menarik bagi khalayak. Maka tidak heran jika editor berkaitan erat dengan audiens. Sedangkan reporter lebih mengutamakan kepentingan sumber berita (*source*). Ia selalu mengupayakan apa yang telah disampaikan seorang narasumber dapat sampai pada khalayak. Dan hal tersebut sering bertentangan dengan agenda editor. Karena pada dasarnya reporter merasa bertanggung jawab pada narasumber terlebih jika hasil wawancaranya tidak muncul pada media tersebut. Di lain pihak editor bertanggung jawab pada audiens.

Tapi pada akhirnya konflik tersebut harus diatasi karena ada tuntutan dari organisasi yang membuat keduanya bekerja sama. Dengan begitu rutinitas editor disesuaikan agar dapat menghasilkan berita yang sesuai dengan tuntutan organisasi. Seperti yang dikemukakan Shoemaker, "... *that media content is*

*produced in an organizational and bureaucratic setting.”*¹⁵ (Shoemaker, 1991:140), sehingga tak jarang agenda editor dan reporter tidak lagi berlaku karena ada birokrasi yang mengatur produksi media.

Tujuan dari organisasi juga dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi isi berita (media pada umumnya). Seperti yang dipaparkan Shoemaker dalam bukunya, kebanyakan organisasi memiliki tujuan utama ekonomis, untuk meraih keuntungan. Tidak terkecuali organisasi media. Selain tujuan utama, ada beberapa tujuan lain yang dapat mendukung tercapainya tujuan utama :“... *such as to produce a quality product, serve public, and achieve professional recognition.*”¹⁶

Dengan begitu, produk media tidak lagi murni demi melayani masyarakat tapi lebih mengutamakan keuntungan. “*Press scholars have been particularly interested in how these economic goals affect the journalistic product.*”¹⁷. Bahkan para jurnalis yang bekerja dalam organisasi media tersebut menurut Sigal (1979) dalam buku Shoemaker, menemui kesulitan dalam menghubungkan permintaan audiens dan pendapatan iklan, pada sifat dan kualitas peliputan berita. Mau tak mau, isi berita terpengaruh pada permintaan audiens dan pengiklan yang menjadi sumber pemasukan bagi organisasi. Selain itu tanpa disadari pertimbangan ekonomi memiliki pengaruh tidak langsung pada keputusan editorial.

¹⁵ Diterjemahkan menjadi :”...bahwa isi media diproduksi dalam suatu setting organisasional dan birokrasi.”

¹⁶ “... seperti untuk memproduksi produk berkualitas, melayani publik, dan mencapai rekognisi profesional.” Opus Citato, Shoemaker, (1991 : 145)

¹⁷ Ahli pers secara khusus telah tertarik dalam bagaimana tujuan ekonomi ini mempengaruhi produk jurnalistik. Opus Citato, Shoemaker, (1991 : 145)

Dengan begitu terdapat kesamaan pemikiran antara Ibnu Hamad dengan Pamela Shoemaker, yakni bahwa media massa mempertimbangkan faktor internal dan eksternal dalam memproduksi suatu berita. Faktor internal adalah dari sisi ideologi media serta wartawan. Sedangkan faktor eksternal terkait dengan relasi media dengan tokoh-tokoh politik maupun ekonomi namun faktor eksternal ini lebih cenderung karena pertimbangan keuntungan secara ekonomis.

2. Framing sebagai Strategi Pengemasan Berita

Framing pada bagian ini merupakan kerangka teori yang berguna untuk mengarahkan serta menjawab pertanyaan penelitian. Pada tahapan analisis hasil penelitian, peneliti juga menggunakan framing sebagai teknik analisis data dengan memakai perangkat framing Pan dan Kosicki yang akan dijelaskan lebih lengkap pada bagian Analisis Data. Sedangkan pada bagian ini, framing digunakan untuk menjelaskan adanya proses seleksi dan pembentukan berita yang dimulai sejak wartawan berada di lapangan. Proses pembentukan berita tersebut juga merupakan bagian dari konstruksi realitas dalam media massa sehingga melalui teori ini, peneliti ingin memperkuat argumen Ibnu Hamad mengenai konstruksi realitas politik dalam media.

Mark Fishman¹⁸ seperti dipaparkan Eriyanto (2005:101), menjelaskan ada dua studi mengenai bagaimana proses produksi berita dilihat, yaitu sebagai berikut :

a. Seleksi Berita (*Selectivity of News*)

Intisari dalam pandangan ini adalah bahwa proses produksi berita adalah juga proses seleksi. Proses seleksi ini sudah dimulai sejak wartawan di lapangan

¹⁸ Berita menurut Fishman adalah bukan suatu refleksi atau distorsi dari realitas yang seakan berada di luar sana karena dia berpendapat tidak ada realitas dalam arti riil yang berada di luar diri wartawan. Maka dari itu berita adalah apa yang dibuat oleh wartawan (pembuat berita).

memilih peristiwa mana yang penting diberitakan dan mana yang tidak. Kemudian proses tersebut berlanjut saat berita sampai pada redaktur yang melakukan seleksi dengan menekankan bagian mana yang perlu ditambah atau dikurangi.

b. Pembentukan Berita (*Creation of News*)

Dalam perspektif ini realitas bukan diseleksi melainkan dibentuk oleh wartawan. Jadi, wartawanlah yang membentuk realitas dalam berita melalui pemilihan *angle* berita, pemilihan *lead*, serta penempatan narasumber beserta porsi pernyataan dari narasumber tersebut.

Maka dari itu, yang menjadi fokus perhatian dalam perspektif ini ialah rutinitas dan nilai-nilai kerja wartawan yang menghasilkan berita tertentu. Seperti diterjemahkan Eriyanto dari pemikiran Fishman bahwa *berita dihasilkan dari pengetahuan dan pikiran, bukan karena ada realitas objektif yang berada di luar (Eriyanto, 2005:101)*, melainkan karena ada orang yang mengorganisasikan dunia abstrak menjadi lebih beraturan dan bermakna. Selain itu proses terbentuknya berita tidak bersifat mengalir melainkan karena setiap bagian pada dasarnya membentuk konstruksi dan realitasnya masing-masing.

Selanjutnya dapat mencermati **Bagan I.2** untuk melihat proses framing dalam suatu berita. Pada bagan itu dapat terlihat adanya empat tahapan / proses untuk menghasilkan sebuah frame berita, yakni sebagai berikut :

a. *Frame Building*

Pada tahapan pertama ini merupakan tahap awal dimana sebuah frame dibangun dengan mempertimbangkan hal-hal yang bersifat internal dan eksternal media, seperti ideologi media (*organisational pressure*), ideologi wartawan

sebagai individu (*individual ideologies*), serta kepentingan para elit politik dan ekonomi yang menjalin relasi dengan media tersebut. Setelah seluruh materi untuk membangun suatu frame dirangkum menjadi satu, maka akan menghasilkan *Media Frame* yang akan dipasang dalam setiap pemberitaan media massa itu.

Seperti yang dijelaskan Dietram Scheufele dalam tulisannya *Framing as a Theory of Media Effects*¹⁹ di *Journal of Communication*, bahwa pada tahap *frame building*, jurnalis merupakan faktor pertama yang mempengaruhi proses pembentukannya, yakni apa yang melekat pada dirinya seperti ideologi, sikap, ataupun norma-norma pegangan hidup. “*The formation of frames is moderated by variables such as ideology, attitudes, and professional norms and is eventually reflected in the way journalists frame news coverage.*” (Scheufele, 1999: 115)

Tentunya *media frame* ini akan berbeda sesuai dengan topik atau isu yang akan diberitakan. Namun umumnya frame media tersebut bersifat konsisten terhadap isu yang sama. Misalnya dalam penelitian ini, topiknya adalah polemik pengisian jabatan gubernur, maka frame media akan sama jika terkait dengan topik tersebut.

b. *Frame Setting*

Pada tahapan kedua ini terjadi proses pengaturan *frame* oleh media massa terhadap frame audiens melalui produk yang dihasilkan dari *frame building*, yakni *frame media*. Frame media inilah yang mempengaruhi frame audiens sehingga audiens memiliki cara pandang yang sama dengan bagaimana media massa

¹⁹ Dietram A. Scheufele. 1999. “*Framing as a Theory of Media Effects*” dalam *Journal of Communication*. Madison : Inform Global.

tersebut memandang suatu permasalahan atau isu – isu tertentu. Bahkan frame media tersebut dapat memicu terbentuknya opini publik.

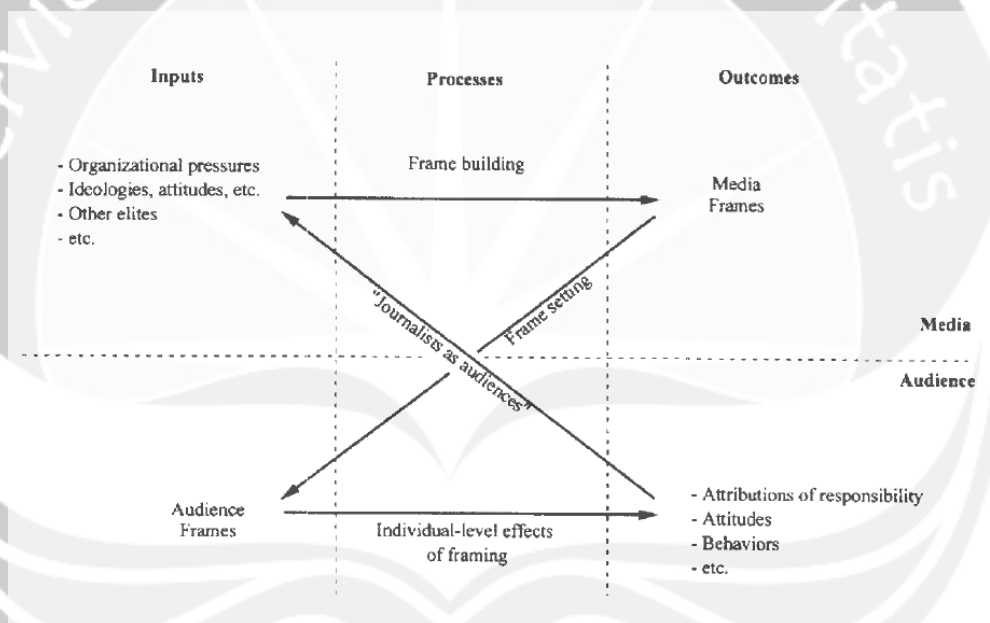
Hal tersebut serupa dengan pemikiran McCombs yang dikutip oleh Scheufele bahwa media memiliki akses untuk membentuk *frame* audiens dengan melakukan penonjolan isu, “*frame influences opinions by stressing specific values, facts, and other considerations, endowing them with greater apparent relevance to the issue than they might appear to have under an alternative frame.*” (Scheufele, 1999:116). Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa bagaimana orang-orang memandang suatu isu telah dipengaruhi karena adanya agenda media dalam menonjolkan isu-isu tertentu.

c. *Individual Level Effects of Framing*

Pada tahapan ini proses framing lebih ditekankan pada bagaimana *frame* audiens secara umum berpengaruh pada masing-masing individu pembaca hingga membawa perubahan pada sikap (*attitudes*), perilaku (*behavior*), serta atribut tanggung jawab terhadap peran masyarakat dalam menghadapi suatu isu / masalah (*attribution of responsibility*). Efek framing tersebut akhirnya akan menjadi masukan bagi media massa atas framing yang telah dilemparkan pada audiens (*feedback*). Dengan begitu, media massa mendapatkan respon / *feedback* atas pemberitaan yang telah disajikan kepada audiens. Apakah framing tersebut berhasil atau sebaliknya. Karena hal itu akan berpengaruh terhadap tahapan keempat.

d. *Journalist as Audiences*

Pada tahapan keempat ini *feedback* atas proses di tahapan ketiga diterima media massa melalui si jurnalis yang merupakan pelaku di lapangan. Semua *feedback* dari audiens akan kembali menjadi masukan bagi media serta jurnalis untuk membangun sebuah frame, seperti ideologi media dan ideologi jurnalis selaku individu. Maka dari itu, pola framing akan kembali berulang dari tahap satu hingga empat. Namun lain halnya jika berita yang diframing adalah berita tunggal maka tahap keempat tidak terjadi.



Bagan I.2
Proses Framing dalam Berita
 (Sumber: Scheufele, 1999:115)

3. Penjelasan Konsep Opini dan Masyarakat

Penjelasan konsep opini dan masyarakat berikut ini lebih berfungsi untuk memaparkan makna 'opini masyarakat' yang tertera dalam judul penelitian sehingga memudahkan pemahaman opini seperti apa yang dimaksud serta masyarakat mana yang dimaksud. Bahwa secara garis besar, yang dimaksud

dengan ‘opini masyarakat’ oleh peneliti adalah pernyataan – pernyataan ataupun pendapat narasumber yang dimunculkan dalam berita – berita *headline* seputar polemik pengisian jabatan gubernur DIY. Sedangkan masyarakat sendiri diartikan secara luas dan mencakup seluruh golongan karena penelitian ini juga ingin mendapatkan pemetaan narasumber yang dimunculkan oleh media sehingga peneliti tidak membatasi pada kelompok masyarakat tertentu. Namun untuk detilnya, berikut peneliti uraikan secara terpisah konsep opini dan masyarakat berdasarkan teori Opini Publik menurut Dan Nimmo.

Opini yang dimaksud dalam penelitian ini sedikit banyak mengacu pada pengertian ‘opini’ dari Opini Publik menurut Dan Nimmo. Nimmo, seperti dikutip Zulkarimen Nasution (1989:91) menyatakan opini adalah *suatu respon yang aktif terhadap suatu stimulus, yang dikonstruksikan melalui interpretasi pribadi*. Menurut Nasution, opini memiliki empat karakteristik utama, yaitu mempunyai arah, mengandung isi informasi, stabil, dan mempunyai intensitas. Maka dari itu, opini dari setiap orang memiliki arah tertentu sesuai dengan isu yang dihadapi dan menunjukkan keberpihakannya. Misalnya, dalam isu mengenai kekerasan dalam rumah tangga, seorang perempuan cenderung berada di pihak yang menentang.

Dalam bukunya yang berjudul *Komunikasi Politik Suatu Pengantar*, Nasution menjelaskan bahwa isi dari opini seseorang mampu menggambarkan intensitas orang tersebut terhadap isu yang dihadapi. Ada orang yang secara intens mengikuti perkembangan isu, ada pula yang kurang memperhatikan karena merasa tidak berkepentingan. Intens tidaknya opini seseorang dalam mengikuti suatu isu ternyata dipengaruhi beberapa hal, seperti sebagai berikut :

- a. Karena benar-benar berkepentingan sendiri
 - b. Menyangkut identifikasi kelompok tempatnya bergabung
 - c. Menyangkut nilai-nilai sosial
 - d. Karena kekhususan dari “kepentingan spesial”
 - e. Karena merupakan bagian dari pola keterlibatan dan *concern* politiknya.
- (Nasution, 1989:94)

Maka dari itu, melalui opini masyarakat yang muncul dalam berita *headline* di *KR* dan *Bernas Jogja* dapat terlihat kecenderungan ataupun intensitas narasumber terhadap wacana polemik jabatan gubernur DIY. Jika opini atau pendapat yang disampaikan mengandung informasi penting dan mampu berpengaruh terhadap polemik yang terjadi, maka narasumber tersebut dapat dikatakan mengikuti perkembangan serta memiliki perhatian terhadap wacana yang ada.

Sementara itu, konsep masyarakat dapat disejajarkan dengan pengertian konsep ‘publik’ dalam Opini Publik, yakni “*kumpulan*” orang-orang yang sama minat dan kepentingannya terhadap suatu isu (Nasution, 1989:94), namun tetap dibedakan dengan kerumunan (*crowd*). Hal itu dikarenakan publik bersifat stabil, sedangkan kerumunan cenderung bersifat emosional. Menurut Nasution (1989:94), publik ditandai dengan kemunculan suatu isu, yang kemudian akan menghasilkan terbentuknya opini mengenai isu tersebut. Publik juga bersifat kontroversial dan di dalamnya terdapat proses diskusi. Hal itu sejalan dengan penelitian ini yang membahas mengenai polemik jabatan gubernur karena opini masyarakat (publik) yang muncul di media mengandung pro – kontra dan perdebatan antara narasumber satu dengan lainnya.

Nasution (1989:95) dalam bukunya juga membedakan publik menjadi dua, yaitu pendapat publik atau masyarakat awam (*general public opinion*) dan golongan elit yang memiliki keterkaitan dengan isu tersebut karena faktor

pendidikan atau posisi mereka (*elite public opinion*). Hal itulah yang diinginkan peneliti dalam konteks penelitian ini, yakni tidak membatasi golongan masyarakat apa yang muncul dalam pemberitaan melainkan mencakup masyarakat awam dan juga golongan elit. Dengan demikian, peneliti tidak menutup kemungkinan adanya opini masyarakat awam yang dimunculkan dalam berita *headline*, namun juga dapat semakin memperjelas narasumber dari kelompok mana saja yang dimunculkan oleh *KR* dan *Bernas Jogja* seputar polemik pengisian jabatan gubernur DIY. Maka dari itu, masyarakat yang dimaksud adalah semua golongan yang opininya muncul atau singkatnya narasumber dalam berita *headline* SKH *Kedaulatan Rakyat* dan SKH *Bernas Jogja*, baik itu dari aktor politik, aparat pemerintah (baik pusat atau daerah), kelompok profesi²⁰, kelompok intelektual²¹, masyarakat desa (petani, nelayan, pedagang pasar, perangkat desa / kelurahan), pengusaha / ekonom, dan mahasiswa. Peneliti juga tidak membatasi masyarakat yang dimintakan opini hanya yang berada di Yogyakarta karena terbuka peluang narasumber yang berada di pemerintahan pusat, yakni di Jakarta juga memberikan pernyataan melalui dua media lokal tersebut

²⁰ Lihat Arif Zulkifli. 1996. *PDI di mata Golongan Menengah Indonesia*. Jakarta : Pusaka Utama. Hal.31. Dalam penelitiannya, Zulkifli menentukan kelompok profesional berdasarkan ciri adanya organisasi profesi, antara lain dokter (adanya organisasi profesi Persatuan Dokter Gigi, Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Ahli Bedah Indonesia,dll), Insinyur (Persatuan Insinyur Indonesia), bidan (Ikatan Bidan Indonesia), praktisi hukum (Ikadin, dll), sekretaris (Ikatan Sekretaris), akuntan (Ikatan Akuntan Indonesia), dll.

²¹. *Opus Citato*, Zulkifli, 1996: 29. Dalam bukunya, Zulkifli telah mengelompokkan kaum intelektual dalam sebelas kategori, yaitu wartawan, peneliti, penulis, teoritis sosial, saintis, seniman, budayawan, pengamat politik, dosen, filsuf, dan pemikir agama (termasuk kiai, pastur, biksu, sufi)

G. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi secara umum dapat diartikan sebagai keseluruhan cara berpikir peneliti untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian sehingga mencakup banyak hal. Menurut Pawito, metodologi meliputi

cara pandang dan prinsip berpikir mengenai gejala yang diteliti, pendekatan yang digunakan, prosedur ilmiah (metode) yang ditempuh, termasuk dalam mengumpulkan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. (Pawito,2007:83)

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang *“bertujuan membuat deskripsi, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu”* (Kriyantono, 2007:68). Karena penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, maka penelitian ini tidak menjelaskan hubungan antar variabel melainkan menggambarkan realitas yang sedang terjadi. Bahkan dalam buku *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Kriyantono mencontohkan bahwa penelitian yang cocok dengan jenis ini adalah mengenai opini pembaca surat kabar sehingga sesuai dengan topik penelitian ini.

Selain itu, Pawito dalam buku *Penelitian Komunikasi Kualitatif* menjelaskan bahwa penelitian dengan pendekatan kualitatif *“lebih dimaksudkan untuk mengemukakan gambaran dan pemahaman mengenai bagaimana dan mengapa suatu realitas komunikasi terjadi”* (Pawito, 2007:35).

2. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan penjelasan secara teknis mengenai metode-metode yang akan digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah analisis isi kualitatif. Menurut Altheide dalam buku Kriyantono, *analisis isi kualitatif merupakan perpaduan antara analisis isi*

objektif dengan observasi partisipan (Kriyantono, 2007:249). Yang dimaksud perpaduan analisis isi objektif dengan observasi partisipan adalah peneliti melakukan analisis isi dan turut berinteraksi dengan subjek penelitian melalui wawancara mendalam. Dengan demikian, peneliti dapat memperoleh pernyataan-pernyataan spesifik yang dapat diletakkan pada konteks yang tepat untuk dianalisis yang tidak didapat melalui analisis isi kuantitatif. Adanya interaksi antara peneliti dengan subjek penelitian itulah yang menunjukkan aspek observasi partisipan dalam analisis isi kualitatif.

Menurut Kriyantono, ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam metode analisis isi kualitatif, yaitu :

1. Isi (konten) atau situasi sosial seputar dokumen (pesan atau teks) yang diriset. Misalnya, periset harus mempertimbangkan faktor ideologi institusi media, latar belakang wartawan & bisni, karena faktor-faktor ini menentukan isi berita dari media tersebut.
2. Proses atau bagaimana suatu produk media atau isi pesannya dikreasi secara aktual dan diorganisasikan secara bersama. Misalnya bagaimana berita diproses, bagaimana realitas objektif diedit ke dalam realitas media massa, dan lainnya.
3. *Emergence*, yakni pembentukan secara bertahap dari makna sebuah pesan melalui pemahaman dan interpretasi. Dalam proses ini periset akan mengetahui apa dan bagaimana si pembuat pesan dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya atau bagaimana si pembuat pesan mendefinisikan sebuah situasi.

(Sumber: Kriyantono, 2007:250)

Kriyantono dalam bukunya juga memaparkan bahwa metode analisis isi kualitatif juga terpengaruh pandangan kritis Marxis, bahwa *media bukanlah kesatuan netral (Kriyantono, 2007:250)*. Dengan maksud, peneliti dalam melakukan analisis harus bersikap kritis terhadap realitas yang ada dalam teks yang dianalisis. Kriyantono (2007:251) menguraikan bahwa dengan adanya pandangan kritis dalam analisis isi kualitatif, maka peneliti harus memandang *segala macam produksi pesan adalah teks, seperti berita yang tidak bisa lepas dari kepentingan si pembuat pesan*. Oleh karena itu, berita tidak dapat dianggap

sebagai realitas sebenarnya karena sudah melalui proses seleksi dan telah disusun berdasarkan pertimbangan redaksi. Artinya, unsur subjektivitas wartawan dalam menulis berita menjadi kuat dalam proses produksi berita. Untuk itulah, peneliti harus lebih jeli melihat pesan yang disampaikan melalui teks berita, dimana dalam teks tersebut terdapat kepentingan dari si pembuat pesan.

Berdasarkan sumbernya, Kriyantono (2007:43-44) membagi jenis data menjadi dua, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti di lapangan. Dalam metode analisis isi kualitatif, data primer penelitian ini adalah dokumentasi berita-berita SKH *Kedaulatan Rakyat* dan SKH *Bernas Jogja* dalam rentang waktu 1 September – 9 Oktober 2008 mengenai masalah pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur DIY periode 2008 – 2013 serta hasil wawancara (pada level konteks) dengan awak media dari kedua koran lokal tersebut dan pihak di luar dua koran itu.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain yang dapat digunakan sebagai data atau informasi tambahan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini berupa brosur media, profil perusahaan, penelitian lain, buku sejarah media, data oplag koran, serta hasil jajak pendapat dari Litbang *Kompas*. .

Sementara itu, proses pengumpulan data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu pada level teks dan level konteks. Dengan demikian, peneliti dapat

mencermati secara lebih detail mengenai konstruksi realitas dalam teks berita melalui perangkat framing Pan dan Kosicki (level teks) serta melakukan wawancara dengan pihak redaksi untuk menggali data pada level konteks.

a. Level teks

Pada level ini peneliti memetakan berita-berita pada *KR* dan *Bernas Jogja* berdasarkan rubrik untuk melihat posisi pemberitaan polemik pengisian jabatan gubernur DIY. Hasil dari pemetaan tersebut menunjukkan bahwa *KR* dan *Bernas Jogja* sebagian besar menempatkan berita-berita seputar polemik jabatan gubernur DIY dihalaman muka, dan kebanyakan diletakkan sebagai berita utama (*headline*)²². Selain itu, peneliti juga memetakan tema-tema pemberitaan yang paling gencar diangkat oleh *KR* maupun *Bernas Jogja* selama periode 1 September – 9 Oktober 2008 dan terdapat lima tema besar yang sering dimunculkan, yaitu sebagai berikut :

1. Perpanjangan jabatan gubernur DIY sebagai solusi mengatasi kekosongan pemerintahan DIY
2. Munculnya pro-kontra mengenai usulan perpanjangan jabatan gubernur.
3. Payung hukum perpanjangan jabatan gubernur DIY diragukan.
4. Tanggapan Sultan HB X mengenai usulan perpanjangan jabatan gubernur DIY sebagai solusi mengatasi kekosongan pemerintahan.
5. Masyarakat DIY tetap menginginkan penetapan Sultan HB X dan PA IX sebagai Gubernur dan wakil gubernur DIY.

²² Data detil lihat pada Bab III bagian Pengantar.

Dengan adanya tema-tema pemberitaan, peneliti lalu memasukkan berita-berita (khususnya berita *headline*) dari masing-masing koran kedalam tema tersebut. Kemudian dari masing-masing tema itulah, peneliti memilih satu artikel dari setiap koran yang dianggap paling representatif untuk dianalisis, dengan alasan sebagai berikut :

- Tema 1

- a. “Jabatan Gubernur Diperpanjang” edisi 8 September 2008 *Kedaulatan Rakyat*.

Artikel ini dipilih mewakili sekian berita lainnya karena terdapat narasumber penting, yakni Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang merupakan pengambil kebijakan penting dalam polemik ini. Selain itu, artikel ini merupakan hasil wawancara eksklusif antara Presiden dengan wartawan *KR* di kediamannya.

- b. “Jabatan Gubernur Perlu Diperpanjang” edisi 3 September 2008 *Bernas Jogja*.

Artikel ini dipilih karena wacana perpanjangan jabatan gubernur tersebut baru pertama kali muncul di tingkat daerah Yogyakarta sendiri, bahkan memuat opini mengenai pemilihan gubernur DIY.

- Tema 2

- a. “DPRD DIY Tolak Keputusan SBY” edisi 10 September 2008 *Kedaulatan Rakyat*.

Artikel ini dipilih karena lebih menggambarkan adanya penolakan terhadap usulan perpanjangan karena terdapat berbagai narasumber dari kelompok masyarakat yang berbeda dan sebagian besar ikut menolak. Dengan begitu mengandung nilai konflik tinggi.

- b. “Suksesi Harus Hati-hati!” edisi 15 September 2008 *SKH Bernas Jogja*.

Artikel ini dipilih karena memuat pendapat yang menilai perpanjangan jabatan gubernur tidak lazim sehingga termasuk kelompok yang kontra perpanjangan.

- Tema 3

a. “Pemerintah Akan Terbitkan Perpu” edisi 12 September 2008 SKH *Kedaulatan Rakyat*.

Artikel ini dipilih karena mampu menggambarkan proses serta dinamika di pemerintah pusat dalam menentukan kebijakan serta solusi terbaik bagi polemik di DIY.

b. “Keppres Langgar UUD 1945” edisi 11 September 2008 SKH *Bernas Jogja*.

Artikel ini dipilih karena mengandung pendapat yang secara lantang dan tegas menentang adanya perpanjangan karena dapat melanggar UUD 1945.

- Tema 4

a. “Sultan Bantah Kirim Utusan” edisi 9 September 2008 SKH *Kedaulatan Rakyat*.

Artikel ini dipilih karena merupakan respon langsung dari Sultan HB X yang menanggapi soal rencana perpanjangan jabatan gubernur selama dua tahun yang disampaikan Presiden sehari sebelumnya, yakni pada 8 September 2008.

b. “Gubernur DIY Diperpanjang 2 tahun.” 9 September 2008 SKH *Bernas Jogja*.

Artikel ini dipilih karena merupakan respon langsung dari Sultan HB X yang menanggapi soal rencana perpanjangan jabatan gubernur selama dua tahun yang disampaikan Presiden sehari sebelumnya, yakni pada 8 September 2008.

- Tema 5

a. “GRY Ancam Melantik Sultan” edisi 1 September 2008 SKH *Kedaulatan Rakyat*.

Artikel ini dipilih karena banyak mengandung suara serta aspirasi dari masyarakat menengah ke bawah yang ingin mempertahankan Sultan HB X sebagai gubernur DIY.

b. “Provokator Mulai Berkeliaran” edisi 6 Oktober 2008 SKH *Bernas Jogja*.

Artikel ini dipilih karena banyak mengandung suara serta aspirasi dari masyarakat menengah ke bawah yang ingin mempertahankan Sultan HB X sebagai gubernur DIY. Artikel ini juga persiapan menjelang diadakannya Sidang Rakyat yang ingin melantik Sultan HB X dan PA IX sebagai gubernur dan wakil gubernur DIY.

Selanjutnya, peneliti memasukkan artikel berita yang terpilih pada *coding sheet* (lembar koding) yang memuat perangkat framing Pan dan Kosicki, untuk kemudian dianalisis sehingga mendapatkan *frame* media dari masing-masing koran lokal.

b. Level Konteks

Demi memperoleh data yang lengkap khususnya dalam upaya melihat konstruksi media dalam pemberitaan, maka peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak redaksi SKH *Kedaulatan Rakyat* dan SKH *Bernas Jogja* seperti pemimpin redaksi, redaktur pelaksana, redaktur halaman, serta wartawan yang bersangkutan. Wawancara juga berguna untuk menggali informasi pada level konteks yakni mengenai kebijakan dalam pemilihan narasumber serta penempatan berita karena keterangan atau data semacam itu tidak diperoleh hanya dengan melalui analisis isi teks. Dengan begitu, peneliti dapat membuat kesimpulan

bagaimana suatu opini narasumber dibingkai oleh SKH *Kedaulatan Rakyat* dan SKH *Bernas Jogja* menjadi sebuah teks berita berdasarkan temuan analisis teks dan hasil wawancara dengan pihak redaksi *KR* dan *Bernas Jogja* yang menggali dari aspek konteks saat berita tersebut dibuat. Selain itu, peneliti juga telah menambahkan dua narasumber di luar kedua koran tersebut sebagai pelengkap dan penguat hasil analisis konteks.

3. Subyek dan Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah teks berita dari SKH *Kedaulatan Rakyat* dan SKH *Bernas Jogja* pada tanggal 1 September – 9 Oktober 2008 yang memuat topik mengenai masalah pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur periode 2008 – 2013. Artikel berita yang diteliti adalah *Straight news / hard news*. Sedangkan untuk tulisan opini diabaikan karena media tidak memiliki campur tangan dalam membingkai atau mengkonstruksi isi dari artikel opini tersebut sehingga tidak termasuk dalam penelitian.

Subyek penelitian ini adalah para pekerja media dari SKH *Kedaulatan Rakyat* dan SKH *Bernas Jogja* yaitu wartawan, redaktur, redaktur pelaksana, serta pemimpin redaksi. Berikut daftar subyek penelitian yang telah diwawancarai :

1. Octo Lampito selaku Pemimpin Redaksi SKH *Kedaulatan Rakyat*
2. Hudhono selaku Redaktur Pelaksana SKH *Kedaulatan Rakyat*
3. MN Hasan selaku Redaktur Halaman Bisnis SKH *Kedaulatan Rakyat*²³
4. Primaswolo Sudjono selaku Wartawan Senior sekaligus Redaktur Halaman Yogyakarta SKH *Kedaulatan Rakyat*.

²³ Sebelumnya MN Hasan bertugas meliput di kepatihan dan menulis mengenai masalah pengisian jabatan gubernur DIY. Oleh karena itu, peneliti juga mewawancarainya karena Hasan sedikit banyak ikut mengalami masa-masa polemik tersebut.

5. Herlambang selaku Redaktur Pelaksana SKH *Bernas Jogja*
6. Sugeng selaku Redaktur Pelaksana SKH *Bernas Jogja*
7. Philip selaku Redaktur Halaman SKH *Bernas Jogja*
8. Sholihul Hadi selaku Wartawan Senior sekaligus Asisten Redaktur SKH *Bernas Jogja*
9. Robertus Arianto selaku Wartawan Propinsi SKH *Bernas Jogja*

Selain narasumber yang berasal dari kedua koran itu, peneliti juga sempat melakukan wawancara singkat (semacam obrolan) dengan narasumber diluar *KR* dan *Bernas Jogja*, tapi masih memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Hasil wawancara dengan pihak diluar *KR* dan *Bernas Jogja* sebagian besar dipakai untuk memperkuat temuan pada analisis teks sekaligus juga sebagai alat konfirmasi (*cross check*) terhadap temuan pada analisis konteks²⁴. Narasumber tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Kusno Utomo selaku Wartawan Senior SKH *Radar Jogja*
2. Tavip Agus Rayanto selaku Asisten Pemerintahan Biro Tata Pemerintahan Propinsi DIY²⁵

Melalui hasil wawancara dengan berbagai narasumber itulah, peneliti mampu mendapat data yang berkaitan dengan kebijakan redaksi yang tidak bisa diperoleh jika hanya melalui analisis teks berita. Selain itu, peneliti juga mengkonfirmasi mengenai temuan-temuan pada analisis teks berita untuk memperkaya analisis pada level konteks sehingga data yang didapat lebih detil dan komplit. Peneliti

²⁴ Untuk pernyataan Tavip peneliti kutip pada pembahasan level teks dan konteks *KR*. Sedangkan pernyataan Kusno lebih banyak peneliti gunakan pada pembahasan frame besar *KR* dan *Bernas Jogja*

²⁵ Pernyataan diperoleh berdasarkan hasil diskusi bersama wartawan Kepatihan tanggal 3 September 2009.

menggunakan pernyataan Tavip Agus Rayanto untuk semakin mempertegas sikap pemerintah provinsi DIY. Selain itu, juga sebagai bentuk konfirmasi atas hasil wawancara dengan wartawan *KR* mengenai alasan mengapa pihak pemerintah provinsi DIY tidak dimunculkan sebagai narasumber dalam berita-berita polemik jabatan gubernur DIY.

Sementara untuk pemilihan wartawan senior *Radar Jogja*, peneliti menempatkan pernyataannya sebagai bentuk konfirmasi lain mengenai pemberitaan *KR* dan *Bernas Jogja*. Peneliti pun menyeleksi hasil wawancaranya disesuaikan dengan level konteks baik di *KR* dan *Bernas Jogja*. Sejak awal, peneliti bermaksud menggunakan hasil wawancara Kusno Utomo sebagai sesama wartawan yang telah berkecimpung lama di Yogyakarta untuk menilai *KR* dan *Bernas Jogja*. Terlebih dengan wawasannya seputar keistimewaan DIY yang lebih cenderung pada pemilihan gubernur, sehingga sikapnya itu bisa memperkaya hasil analisis dari kedua koran yang lebih memperjuangkan penetapan gubernur jika dibandingkan dengan wartawan media cetak lokal lainnya²⁶.

Peneliti juga tidak bermaksud mencari kelemahan atau menjatuhkan pihak kedua koran lokal, namun berupaya mencari penegasan serta informasi seputar topik penelitian. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kusno Utomo, peneliti mendapatkan pernyataan yang terbilang berani yang tidak peneliti dapatkan,

²⁶ Berdasarkan observasi di lapangan selama penelitian maupun saat liputan, peneliti sedikit banyak bisa memetakan bahwa kebanyakan Koran lokal DIY berpihak pada penetapan gubernur DIY seperti *Kompas* (khususnya karena Kepala Biro DIY cukup dekat dengan keluarga Kraton. Hal ini berdasarkan penjelasan dari Wartawan *Kompas Jogja* dengan inisial RWN), *Harian Jogja* (sekitar 40% sahamnya milik GKR Hemas berdasarkan penjelasan wartawan *HarJo* dengan inisial SIM).

khususnya saat proses wawancara dengan wartawan *KR*²⁷ Di satu sisi, kesulitan yang peneliti dapatkan saat wawancara dengan wartawan *KR*, menunjukkan ada kehati-hatian dari pihak redaksi. Kehati-hatian itu secara tidak langsung juga menunjukkan adanya tekanan dari pihak redaksi dalam menyampaikan informasi seputar dapur redaksi *KR*. .

Alasan peneliti memilih media tersebut karena keduanya merupakan koran lokal Yogyakarta yang lahir di Yogyakarta sehingga lingkup pemberitaan spesifik pada Yogyakarta beserta peristiwa yang terjadi. *SKH Kedaulatan Rakyat* lahir pada 27 September 1945 dan *SKH Bernas Jogja* lahir pada 15 November 1945, dan keduanya lahir di Yogyakarta. Maka dari itu, dari sisi historis sangat berkaitan dengan Yogyakarta, baik dari segi pemerintahan maupun ikatan emosional dengan masyarakat Yogyakarta.

Bila dipandang dari aspek historis, kedua media tersebut juga lahir pada tahun yang sama ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merdeka dan sesudah Yogyakarta menyatakan bergabung dengan NKRI dalam Maklumat 5 September 1945. Meski demikian *SKH Kedaulatan Rakyat* tetap merupakan koran lokal tertua yang tetap eksis hingga sekarang maka dari itu *SKH Kedaulatan Rakyat* menjadi media utama dalam penelitian ini. Bahkan *KR* terbentuk dalam bulan yang sama setelah Yogyakarta menyatakan bergabung dengan NKRI sehingga mengetahui tapak sejarah sekaligus saksi pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta²⁸.

²⁷ Lihat hal. 267 yang membahas soal analisis frame besar *KR* serta hal.282 dalam Analisis Frame besar *Bernas Jogja*

²⁸ Bahkan *KR* memuat peristiwa pada 30 Juni 1949 mengenai Proklamasi yang dikumandangkan Sri Sultan Hamengku Buwono IX selaku Menteri Negara Koordinator Keamanan sehari sesudah

Selain itu, peneliti juga menyajikan data persebaran wilayah distribusi beberapa koran lokal Yogyakarta, yakni sebagai berikut :

No.	Nama Koran	Daerah Sebaran	Oplah
1.	<i>Kedaulatan Rakyat</i>	a. Kota Yogya b. Kab. Sleman c. Kab. Bantul d. Kab. Kulon Progo e. Kab. Gunung Kidul <hr/> TOTAL +	49.406 23.018 19.953 16.965 14.052 <hr/> 123.394 eks +
2.	<i>Radjar Jogja</i>	a. Jogja Kota (23%) b. Sleman (16%) c. Bantul (12%) d. Kulonprogo (11%) e. Gunungkidul (7%) f. Magelang (12%) g. Prambanan (3%) h. Klaten (1%) i. Muntilan (3%) j. Purworejo (3%) k. Kebumen (2%) l. Sumpiuh (1%) m. Kroya (1%) n. Gombong (1%) o. Temanggung (2%) p. Wonosobo (1%) q. Kutoarjo (1%)	43.000 eks
3.	<i>Bernas Jogja</i>	a. Kota Yogya (31,88%) b. Kab. Sleman (24,91%) c. Kab. Bantul (9,23%) d. Kab. Kulon Progo (2,17%) e. Kab. Gunung Kidul (2,28%) f. Klaten dan Solo (1,22%) g. Magelang & Temanggung (24,79%) h. Purworejo (2,40%)	41.261 eks
4.	<i>Kompas</i>	Seluruh Yogyakarta	21.982 eks
5.	<i>Seputar Indonesia (Sindo)</i>	a. Kota Yogya (26.22%) b. Kab. Sleman (32,9%) c. Kab. Bantul (32.95%) d. Kab. Kulon Progo (2.03%) e. Kab. Gunung Kidul (5.91%) <hr/> TOTAL +	3,249 4,077 4,083 252 732 <hr/> 12,393 eks +
6.	<i>Harian Jogja</i>	a. Kota Yogya (45%)	11.000 eks

tentara Belanda ditarik mundur dari Yogyakarta. Atau yang selalu diperingati sebagai peristiwa Yogyakarta Kembali pada 29 Juni 1949. Kemudian diberitakan lagi pada 7 September 2008.

		b. Kab. Sleman (21%) c. Kab. Bantul (10%) d. Kab. Kulon Progo (9%) e. Kab. Gunung Kidul (7%) f. Purworejo, Muntilan, Magelang, Klaten, Solo (8%)	(DIY dan sekitarnya) 3.000 jadi suplemen di Bisnis Indonesia
7.	<i>Republika</i>	Tidak dapat diakses	-
8.	<i>Koran Tempo</i>	Seluruh Yogyakarta	6.000 eks

Tabel I.2
Data Jumlah Oplag Koran Lokal

(Sumber: Brosur dan informasi dari masing-masing media)

Berdasarkan tabel di atas, maka terlihat bahwa *KR*, *Radar Jogja*, dan *Bernas Jogja* yang memiliki oplah paling tinggi dengan wilayah distribusi yang luas. Untuk itu, ketiga media tersebut memiliki peluang lebih besar untuk mengarahkan atau mempengaruhi opini masyarakat pembaca secara luas karena cakupan wilayahnya juga luas dibanding koran lokal lain. Namun, peneliti lebih memilih *KR* dan *Bernas Jogja* sebagai obyek penelitian dengan pertimbangan kedua koran tersebut merupakan koran yang berbasis kedaerahan (khususnya lokal DIY) dan diterbitkan untuk konsumsi masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya. Sedangkan *Radar Jogja* merupakan koran grup Jawa Pos yang berasal dari Surabaya sehingga kurang memiliki kedekatan emosional. Selain itu *Radar Jogja* baru diterbitkan dan diedarkan di wilayah Yogyakarta pada 1 April 2000²⁹ sehingga kurang kuat dari sisi kedekatan emosional dengan pemerintahan Yogyakarta meski jumlah oplahnya lebih unggul dari *Bernas Jogja*. Jika dibandingkan dengan koran lain, oplag *Bernas Jogja* tetap lebih unggul sehingga peluang menjangkau banyak pembaca lebih besar. Koran-koran lain seperti *Kompas*, *Seputar Indonesia*, *Koran Tempo*, dan *Harian Jogja* sama seperti *Radar Jogja* (khusus *Radar* berasal dari

²⁹ Data berdasarkan brosur dari SKH *Radar Jogja*

Surabaya) yang memiliki induk koran nasional yang terpusat di Jakarta memiliki tingkat kedekatan emosional yang berbeda daripada *KR* dan *Bernas Jogja*, khususnya dalam aspek historis.

Berdasarkan observasi peneliti selama proses wawancara dan dokumentasi berita, kedua media tersebut memiliki perbedaan mencolok bila dipandang dari aspek keredaksian, seperti jumlah wartawan yang dimiliki, kebijakan redaksi dalam pemilihan narasumber, serta dalam hal penulisan berita ataupun soal penempatan berita sebagai *headline*. Dari sisi kualitas wartawan, *KR* cenderung lebih unggul karena memiliki wartawan dengan pengalaman dan wawasan mendalam mengenai keistimewaan serta polemik jabatan gubernur DIY. Dengan begitu, karakter pemberitaannya pun lebih mendalam dan detil karena wartawan yang bertugas telah memiliki banyak pengalaman serta pengetahuan untuk menggali informasi yang lebih menarik mengenai polemik jabatan gubernur. Sementara wartawan *Bernas Jogja* yang bertugas menulis berita polemik terhitung masih pemula (baru sekitar satu tahun bertugas) sehingga pengetahuan soal polemik jabatan gubernur masih dangkal dan kemampuan di lapangan masih jauh dari matang sehingga kurang bisa menggali atau mengulas wacana yang ada secara mendalam.

Dengan adanya perbedaan karakteristik itulah, peneliti ingin membandingkan bagaimana kedua media ‘memperlakukan’ atau membingkai opini dari narasumber ke dalam suatu berita. Selain itu dengan memakai dua media peneliti dapat membandingkan tentang kebijakan redaksi dua media itu mengenai pemilihan narasumber (seleksi) dan penempatan berita (aspek penonjolan).

Dengan demikian, peneliti memilih kedua media karena adanya kesamaan dari aspek historis serta perbedaan mencolok dalam keredaksian antara *KR* dan *Bernas Jogja* khususnya soal peliputan dan penulisan berita sehingga menarik untuk dicermati lebih dalam.

Peneliti memilih pemberitaan yang diambil dari *Kedaulatan Rakyat* dan *Bernas Jogja* sejak 1 September – 9 Oktober 2008 karena satu bulan lebih sebelum berakhirnya masa jabatan Gubernur (9 Oktober 2008) sehingga pemberitaan mengenai polemik pengisian jabatan semakin menghangat. Selain itu ada pernyataan dari Presiden SBY untuk memperpanjang Sultan selama 2 tahun sesuai dengan draf RUUK dari Sekretariat Negara (pada berita 11 September 2008). Padahal hal tersebut tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat DIY yang telah tergabung dalam keputusan DPRD DIY serta tidak ada landasan hukum untuk memperpanjang jabatan Sultan Hamengku Buwono X. Ditambah munculnya isu Sultan yang akan mencalonkan diri di tingkat nasional sebagai capres sehingga dkuatirkan akan terjadi kekosongan pada posisi Gubernur. Apalagi Sultan juga tidak menetapkan sikap tetap akan menjadi gubernur atau capres sehingga polemik ini belum menemukan titik temu ataupun solusi.

Pengertian dari konsep opini di sini adalah pendapat / pernyataan yang diungkapkan oleh masyarakat Masyarakat dalam penelitian ini adalah semua narasumber yang dimintai opininya dalam pemberitaan di SKH *Kedaulatan Rakyat* dan SKH *Bernas Jogja*. Maka dari itu, masyarakat yang dimaksud adalah semua golongan yang opininya muncul dalam SKH *Kedaulatan Rakyat* dan SKH *Bernas Jogja*, baik itu dari aktor politik, aparat pemerintah (baik pusat atau

daerah), kelompok profesi³⁰, kelompok intelektual³¹, masyarakat desa (petani, nelayan, pedagang pasar, perangkat desa / kelurahan), pengusaha / ekonom, dan mahasiswa. Peneliti juga tidak membatasi masyarakat yang dimintakan opini hanya yang berada di Yogyakarta karena terbuka peluang narasumber yang berada di pemerintahan pusat, yakni di Jakarta juga memberikan pernyataan melalui dua media lokal tersebut. Meski hasilnya nanti bukan untuk menggeneralisasikan opini masyarakat secara umum. Masyarakat di sini juga termasuk wartawan sebagai penulis berita yang memiliki peluang untuk mengemukakan pendapatnya secara pribadi.

4. Metode Analisis

Metode analisis dalam penelitian ini memakai metode analisis framing model framing Pan dan Kosicki. Dengan menggunakan model framing Pan dan Kosicki maka peneliti dapat melihat proses konstruksi dua koran lokal (*Kedaulatan Rakyat* dan *Bernas Jogja*) dalam pemberitaan mengenai opini masyarakat Yogyakarta terhadap polemik pengisian jabatan kepala daerah, khususnya dalam membingkai opini masyarakat yang dimunculkan dalam berita.

Framing didefinisikan sebagai proses yang membuat suatu informasi atau pesan menjadi lebih menonjol daripada lainnya sehingga perhatian khalayak fokus pada pesan tersebut. Eriyanto (2005:66) menjelaskan framing adalah pendekatan

³⁰ Lihat Arif Zulkifli. 1996. *PDI di mata Golongan Menengah Indonesia*. Jakarta : Pusaka Utama. Hal.31. Dalam penelitiannya, Zulkifli menentukan kelompok profesional berdasarkan ciri adanya organisasi profesi, antara lain dokter (adanya organisasi profesi Persatuan Dokter Gigi, Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Ahli Bedah Indonesia,dll), Insinyur (Persatuan Insinyur Indonesia), bidan (Ikatan Bidan Indonesia), praktisi hukum (Ikadin, dll), sekretaris (Ikatan Sekretaris), akuntan (Ikatan Akuntan Indonesia), dll.

³¹. *Opus Citato*, Zulkifli, 1996: 29. Dalam bukunya, Zulkifli telah mengelompokkan kaum intelektual dalam sebelas kategori, yaitu wartawan, peneliti, penulis, teoritis sosial, saintis, seniman, budayawan, pengamat politik, dosen, filsuf, dan pemikir agama (termasuk kiai, pastur, biksu, sufi)

untuk melihat bagaimana realitas dibentuk dan dikonstruksi oleh media dimana kemudian media akan melakukan seleksi serta penonjolan pada aspek-aspek tertentu sehingga perhatian khalayak akan tertuju pada aspek yang ditonjolkan oleh media.

Menurut Eriyanto (2005:69-70) ada dua aspek dalam framing yang perlu diperhatikan, yakni :

a. Memilih fakta / realitas

Wartawan selama di lapangan akan melakukan pemilihan fakta / realitas karena tidak semua fakta dapat disajikan pada media. Selain itu, wartawan juga akan melakukan pemilihan mengenai bagian mana dari realitas yang diberitakan dan mana yang tidak diberitakan. Maka dari itu, setiap media akan memiliki pemaknaan yang berbeda terhadap realitas yang sama. *Penekanan aspek tertentu itu dilakukan dengan memilih aspek tertentu, memilih fakta tertentu, dan melupakan fakta yang lain, memberitakan aspek tertentu, dan melupakan aspek lainnya. Intinya, peristiwa dilihat dari sisi tertentu. (Eriyanto, 2005:69-70).*

b. Menuliskan fakta

Proses ini merupakan bagian dimana media mencoba menyajikan suatu realitas menggunakan perangkat atau atribut tertentu untuk menonjolkan fakta yang sudah dipilih. Penonjolan fakta tersebut dapat diungkapkan melalui pemilihan kata-kata, kalimat, foto, dan sebagainya. Sedangkan perangkat yang digunakan untuk menekankan fakta yang sudah dipilih adalah sebagai berikut :

Penempatan yang mencolok(menempatkan di *headline* depan, atau bagian belakang), pengulangan, pemakaian grafis untuk mendukung dan memperkuat penonjolan, pemakaian label tertentu ketika menggambarkan orang/peristiwa yang diberitakan, generalisasi, simplifikasi (penyederhanaan), dan pemakaian kata yang mencolok. (Eriyanto, 2005:70)

Sedangkan peneliti memakai analisis framing model Zhongdang Pan dan Gerald M, Kosicki yang menilai bahwa analisis framing memiliki karakter berbeda dibanding teknik analisis isi lainnya. Pan dan Kosicki dalam Eriyanto (2005:251-252) menjelaskan analisis framing sebagai berikut :

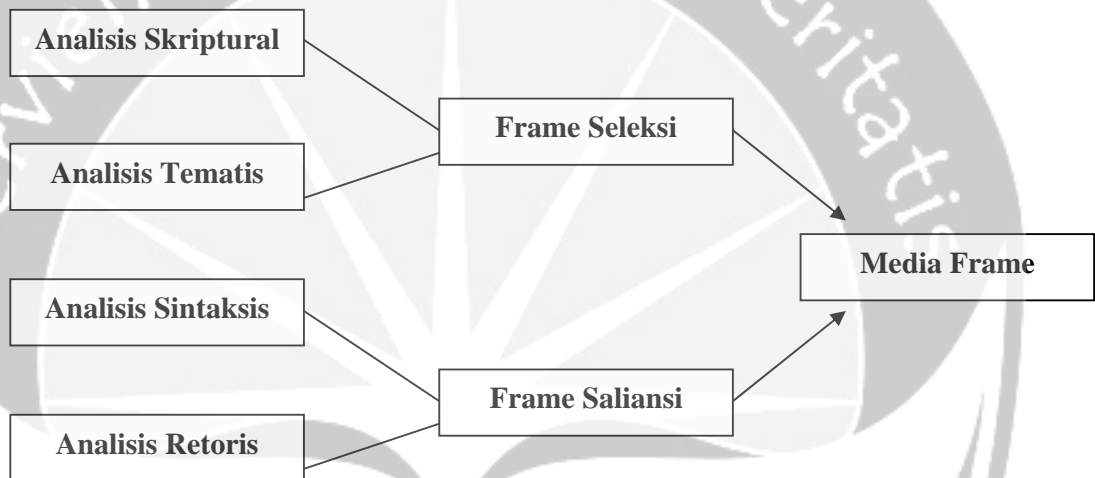
- a. Dalam analisis framing, teks berita dilihat terdiri dari berbagai simbol yang disusun lewat perangkat simbolik yang akan dikonstruksi dalam memori khalayak.
- b. Teks berita dilihat sebagai teks yang dibentuk lewat struktur dan formasi tertentu, melibatkan proses produksi dan konsumsi dari suatu teks.
- c. Validitas dari analisis framing tidak diukur dari objektivitas dari pembacaan peneliti atas teks berita. Tetapi lebih dilihat dari bagaimana teks menyimpan kode-kode yang dapat ditafsirkan dengan jalan tertentu oleh peneliti. Ini mengandaikan tidak ada ukuran yang valid, karena tergantung pada bagaimana seseorang menafsirkan pesan dari teks berita tersebut.

Selain itu, Pan dan Kosicki dalam Eriyanto (2005:252-253) memaparkan bahwa dalam framing terdapat dua konsepsi yang saling berkaitan, yakni konsepsi psikologi dan konsepsi sosiologis. Dalam konsepsi psikologi, framing lebih ditekankan pada bagaimana seseorang memproses informasi dalam dirinya sehingga sangat berkaitan dengan struktur dan proses kognitif masing-masing individu. Hal ini akan terlihat pada saat wartawan mencoba memahami realitas tertentu berdasarkan struktur dan proses kognitifnya. *Framing di sini dilihat sebagai penempatan informasi dalam suatu konteks yang unik / khusus dan menempatkan elemen tertentu dari suatu isu dengan penempatan lebih menonjol dalam kognisi seseorang (Eriyanto, 2005:252)*. Sedangkan konsepsi sosiologis lebih pada bagaimana konstruksi sosial atas realitas. *Framing di sini berfungsi membuat suatu realitas menjadi teridentifikasi, dipahami, dan dapat dimengerti karena sudah dilabeli dengan label tertentu (Eriyanto, 2005:253)*.

Masih dalam buku *Analisis Framing*, Eriyanto (2005:253) lalu memaknai framing sebagai suatu strategi atau cara wartawan dalam mengkonstruksi dan

memproses peristiwa untuk disajikan kepada khalayak. Untuk itulah, diperlukan perangkat khusus untuk membongkar konstruksi suatu media atas realitas. Dalam model framing Pan dan Kosicki, perangkat framing terbagi menjadi empat struktur yang dapat dicermati dalam skema berikut :

Bagan I.4
Skema Pan & Kosicki
(Sumber : Sasangka, 2007)



Sementara itu, penjelasan skema di atas dapat diaplikasikan dalam *coding sheet* berikut ini :

ANALISIS SELEKSI		ANALISIS SALIANSI	
STRUKTUR SKRIPTURAL	STRUKTUR TEMATIS	STRUKTUR SINTAKSIS	STRUKTUR RETORIS
<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi obyek wacana (realitas) yang diangkat - Identifikasi atas pelibat wacana (subyek) bentuk keterlibatannya atau bentuk 	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi atas jenis wacana apakah yang dilantunkan baik oleh pelibat dan pelantun wacana diatas - Identifikasi terhadap pola 	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi terhadap placement masing-masing temuan diatas dalam struktur sebuah pemberitaan - Identifikasi terhadap placement 	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi terhadap metafora, exemplaars, keyword, depiction visual image - Identifikasi terhadap makna perangkat

pernyataannya - Identifikasi atas pelantun wacana (narasumber), pernyataannya serta kepentingan yang direpresentasikan - Mengapa dan untuk apa keterlibatan dan pernyataan pelibat dan pelantun	hubungan yang muncul dalam teks antara satu wacana dengan wacana yang lain, antara pelibat wacana dengan obyek wacana	masing-masing temuan di atas dalam distribusi pembagian halaman	retorik diatas - Identifikasi terhadap fungsi perangkat retorik diatas
FRAME SELEKSI Frame ini didapat dari kedua analisis struktur skrip dan tematik, dimana temuannya memperlihatkan frame pemilihan fakta yang dilakukan wartawan atau media terhadap sebuah peristiwa		FRAME SALIANSI Frame ini didapat dari kedua analisis struktur sintaksis dan retorik, yang mana temuannya memperlihatkan frame penekanan atau penonjolan fakta yang dilakukan wartawan atau media pada peristiwa tersebut	
MEDIA FRAME Berdasarkan frame seleksi dan frame saliansi, gabungan penjelasan dari analisis kedua frame akan menunjukkan atau menjawab bagaimana frame yang dilakukan media terhadap peristiwa melalui beritanya			

Tabel I.3
 .“Coding Sheet Analisis Framing Pan dan Kosicki”
 (Diambil dari Nayoan, 2009:42-43)

Keempat struktur perangkat framing di atas memiliki keterkaitan untuk sampai pada pembongkaran *media frame*. Namun, sebelum sampai pada *media frame*, struktur skriptural dan tematis berfungsi untuk melihat frame seleksi suatu

media. Sedangkan struktur sintaksis dan retorik berfungsi untuk melihat frame saliansi melalui perangkat *placement* (sintaksis) dan metafora, *exemplaars*, *keyword*, *depiction*, dan *visual image* (retoris). Jika dicermati pada skema Pan dan Kosicki maka terlihat bahwa hubungan di antara keempat struktur saling berkaitan dan bukan bersifat linear (berurutan satu-persatu). Melainkan melalui keempat struktur tersebut maka dapat ditemukan frame seleksi dan frame saliansi.

Media frame baru dapat disimpulkan setelah peneliti berhasil mendeteksi frame seleksi ataupun frame saliansi pada media yang bersangkutan atas suatu peristiwa yang dapat dibaca setelah melakukan analisis menggunakan struktur skriptural dan tematis serta struktur sintaksis dan retorik. Setelah analisis pada level teks yang menggunakan perangkat framing Pan dan Kosicki selesai, maka peneliti akan menggabungkannya dengan hasil wawancara (analisis level konteks) wartawan *KR* dan *Bernas Jogja* yang menulis berita-berita tersebut.